Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial
ISSN: 2615-4668 (Online) 2579-7050 (Printer)
V0l. 6, No. 1 (2022); pp. 85-102

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK DALAM BUDIDAYA MADU KELULUT DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH INDRAGIRI HULU

[*1] Herman, [2]Rosmita, [3]Rido Idham
[1 2 3] Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
*herman@soc.uir.ac.id, rosmita@soc.uir.ac.id, ridoidham@student.uir.ac.id

Artikel History
Submit: 21 Februari 2022
Review: 16 April 2022
Revised: 26 April 2022
Accepted: 29 Mei 2022

Abstract: The community empowerment program in the Bukit Tigapuluh National Park area in the cultivation of kelulut honey is a community empowerment program created and managed directly by the Bukit Tigapuluh National Park Office with the target recipient of the program being indigenous people living in this national park area, such as the Talang Mamak Tribe community with the aim of providing empowerment activities so that the community can earn additional income to meet their economic needs. This study aims to analyze and explain how the Talang Mamak Tribe Community Empowerment in the Bukit Tiga Puluh National Park Area in Cultivating Kelulut Honey in Rantau Langsat Village, Batang Gansal District, Indragiri Hulu Regency. This type of research is qualitative by collecting interview and observation data with respondents, namely Balai TNBT and related agencies and the TNBT fostered Forest Farmers Group. In this study, it was found that the implementation of the program had been implemented but not optimal as a whole due to several indicators used in this study such as standards and targets, resources, communication between organizations, and characteristics of implementers. , socio-economic environment and attitude of implementers in program implementation. Not all of the implementation processes of this empowerment program are in the implemented category so that everything is still not maximally implemented.

Keywords: Community Empowerment, Implementation, TNBT.

Pendahuluan

Hutan indonesia merupakan hutan hujan tropis dimana hutan Indonesia merupakan salah satu hutan yang terluas di dunia. Selain Indonesia, negara yang mempunyai luas hutan berdasarkan urutannya adalah Rusia, Brazil, Kanada, Amerika Serikat, China, Australia, Kongo, Indonesia, Peru dan India. Di Indonesia, lebih dari setengah wilayahnya adalah hutan. Dimana Indonesia saat ini menduduki urutan ke

delapan negara dengan hutan terluas di dunia tahun 2020 dengan luas hutan yaitu 97 juta hektar dan menyumbang sekitar dua persen dari total luas hutan di dunia (Kompas.com, 2022).

Sampai saat ini Indonesia telah menetapkan 521 kawasan konservasi meliputi total wilayah 27.108.486 ha, termasuk 221 cagar alam (4,08 juta ha); 75 suaka alam (5,03 juta ha); 50 taman nasional (16,34 juta ha); 23 taman hutan raya (0,35 juta ha); 115 taman wisata alam (0,75 juta ha); dan 13 taman buru (0,22 juta ha). pokok perhatian pengelolaan kawasan konservasi adalah pada taman nasional dengan mengembangkan institusi khusus untuk mengelola kawasan, yang disebut Balai Taman Nasional, yaitu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Siswanto, 2017).

Salah satu bentuk pengelolaan kawasan konservasi adalah taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli yang di kelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi (Undang-Undang No. 5 Tahun 1990). Salah satu taman nasional yang dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi adalah Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) adalah salah satu kawasan pelestarian alam berupa ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah (*lowland tropical rain forest*) yang di tetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 juni 2002 dengan luas kawasan 144.223 Ha (Pribadi et al., 2020).

Sistem zonasi di kawasan TNBT di tetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK 159/KSDAE/Set/KSA.0/6/2016 pada tanggal 9 juni 2016 agar mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan taman nasional. Berikut rincian pembagian wilayah zonasi TNBT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 1: Pembagian Zona TNBT

No	Wilayah Zonasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Zona Inti	55.589,34	38,54
2	Zona Rimba	75.924,37	52,64
3	Zona Pemanfaatan	1.701,88	1,18
4	Zona Tradisional	4.870,49	3,38
5	Zona Rehabilitasi	3.254,13	2,26
6	Zona Khusus	2.882,79	2,00
Total		144.223	100

Sumber Data : Balai TNBT, 2021

Pada tabel tersebut dapat dilihat zona yang diterapkan untuk pemberlakuan zonasi berdasarkan kebutuhan pengelolaan dan ada zona yang akan berkaitan pada penelitian ini yakni Zona Tradisional yang mana pada zona ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan kawasan dengan pertimbangan kawasan tersebut adalah kawasan yang dihuni atau ditinggali oleh masyarakat suku lokal seperti masyarakat Suku Talang Mamak dan suku pedalaman lainnya yang berada dikawasan TNBT.

Talang Mamak merupakan suku asli Indragiri dan sering menyebut diri mereka dengan nama Suku Tuha, yang berarti suku pertama datang di wilayah Indragiri Hulu. Suku Talang Mamak merupakan salah satu suku yang tinggal dan menetap di kawasan TNBT yang lebih tepatnya berada pada kawasan zona tradisional. Mata pencarian Suku Talang Mamak adalah berladang dan berkebun, khususnya karet. Karet merupakan komoditas utama masyarakat Suku Talang Mamak. Sebelum berkebun karet, sejak awal abad ke-19 hasil hutan bervariasi seperti jernang, jelutung, balam merah/putih dan gaharu serta rotan (Charin & Hidayat, 2019).

Permasalahan utama yang di temui oleh masyarakat suku Talang Mamak adalah tingkat kesejahteraan yang masih rendah karena masih mengandalkan hasil dari alam (*ekstratif*). Belum lagi konflik yang terjadi antara suku talang mamak dengan perusahaan swasta dan pemilik modal (Charin & Hidayat, 2019). Kondisi demikian membuat masyarakat Talang Mamak semakin terjepit dan terkepung oleh perkebunan besar (Zubir, 2016).

Dibutuhkan edukasi dan pemberdayaan terhdap masyarakat suku talang mamak yang berada di kawasan konservasi seperti TNBT ini sehingga saat masyarakat merasa kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi dapat mencari penghidupan tanpa harus merusak alam. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan merupakan

komunitas yang rentan terhadap perubahan lingkungan akibat peningkatan pembangunan ekonomi (Satmoko et al., 2019).

Pemberdayaan Menurut Sumardjo memiliki pengertian sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya (Endah, 2020). Pemberdayaan masyarakat menurut Chambers adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred*, *participatory*, *empowering*, and *sustainable*" (Sholichah & Oktoliya, n.d.).

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Balai TNBT yang salah satunya adalah budidaya madu kelulut. Kelulut (*Heterotrigonaitama*) merupakan kelompok lebah tidak bersengat yang memiliki karakter untuk hidup secara satu koloni dan berhabitat di bambu, batang kayu dan tanah (Pribadi, 2020).

Jenis H. Itama *(Heterotrigona Itama)* merupakan salah satu jenis kelulut yang dominan di temukan di daerah pulau sumatera dan sebenarnya produk kelulut yang utama adalah propolis yang dapat di manfaatkan sebagai bahan kosmetik dan obat-obatan (Pribadi et al., 2020). H. Itama juga merupakan jenis yang menjadi prioritas masyarakat untuk dibudidayakan, karena lebih mudah beradaptasi dan mempunyai produksi madu yang lebih banyak (Febrianti et al., 2020). Oleh sebab itu, produk madu kelulut memiliki prospek yang sangat bagus untuk di kembangkan terutama lagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk suku talang mamak ini di susun dan disesuaikan melalui beberapa bentuk pelaksanaan program yang berlandaskan suatu kebijakan yakni kebijakan yang tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Serta dengan Teknis pelaksanaannya yang terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE/SET/kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Sebelumnya, Balai TNBT telah beberapa kali melakukan kegiatan pemberdayaan seperti budidaya jernang dan kelukup, akan tetapi hasil yang di peroleh belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat suku Talang Mamak. Sehingga pada tahun 2018, kegiatan budidaya kelulut mulai diperkenalkan kepada masyarakat Suku Talang Mamak tersebut dan kegiatan pemberdayaan ini merupakan kegiatan pemberdayaan melalui

program kerja sama antara Balai TNBT dengan Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan (BP2TSTH) (Pribadi et al., 2020).

Selain bantuan berupa materi, Balai TNBT juga menginisiasi pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) di dusun-dusun lain yang salah satu tujuannya untuk memudahkan koordinasi dan peningkatan kapasitas mereka. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah KTH pada tahun 2017 yang mana hanya berjumlah empat KTH menjadi delapan KTH pada tahun 2019 dan ada kemungkinan terus bertambah. Berikut jumlah KTH yang sudah dibentuk dan dibina oleh Balai TNBT yaitu:

Tabel 2: KTH Binaan Balai TNBT

No	Nama Kelompok	Lokasi
1	KTH Tunas Harapan	Desa Rantau Langsat
2	KTH Tunggal Warga	Kelurahan Selensen
3	KTH Bina Tani Sejahtera	Keritang
4	KTH Jelemu Bengayouan	Dusun Bengayouan
5	KTH Kasih Alam	Dusun Nunusan
6	KTH Bombam Berduri	Dusun Air Bombam
7	KTH Batu Berduri	Dusun Sadan
8	KTH Tualang Sejahtera	Dusun Tualang, Siambul

Sumber Data: Balai TNBT, 2021

Pada tabel diatas, KTH terbagi dibeberapa zona dan yang memang menjadi sasaran untuk Program Pemberdayaan di zona tradisional ada 4 (Empat) KTH yang Anggota setiap KTH-nya ada sekitar 10 orang yang di isi oleh masyarakat Suku Talang Mamak yakni KTH Jelemu Bengayouan, Kasih Alam, Bombam Berduri dan Batu Berduri.

Kegiatan pemberdayaan budidaya kelulut dilakukan oleh Balai TNBT bekerja sama dengan BP2TSTH. Mengadakan Kegiatan Pelatihan dan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH);Kegiatan pemberian bantuan koloni lebah dan perlengkapan pendukungnya. Kegiatan Pendampingan. Kegiatan Pemasaran dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Keberadaan budidaya kelulut ini mampu memberikan tambahan penghasilan di luar apa yang sudah mereka dapatkan dari alam baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan memanfaatkan jasa lingkungan yang disediakan oleh hutan. Kemudahan perawatan, harga madu yang relatif lebih mahal dan tidak perlu

menunggu lama dalam memperoleh hasil menjadi tiga alasan utama kenapa masyarakat Suku Talang Mamak lebih memilih budidaya kelulut.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disajikan, penulis menarik beberapa fenomena yang akan menjadi dasar dari penelitian yang akan dilakukan diantaranya: Masih kurangnya kebiasaan merawat dan menjaga peralatan yang telah di berikan pihak Balai TNBT oleh masyarakat Suku Talang Mamak. Masih terbatasnya masyarakat yang sadar untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya kelulut. Kurang menguasai teknik budidaya madu kelulut oleh anggota Kelompok Tani Hutan. Keterbatasan akses jalan, komunikasi yang berdampak pada pemasaran hasil produksi madu kelulut. Berhubungan dengan permasalahan di atas yang menggambarkan bahwa masih kurang maksimal pelaksanaan Balai TNBT terhadap beberapa hal mengenai program pemberdayaan masyarakat suku Talang Mamak dalam budidaya madu kelulut.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang mana balai ini merupakan instansi yang ditunjuk untuk melakukan pemberdayaan masyarakat suku Talang Mamak yang ada di zona tradisional dan khususnya adalah Desa Rantau Langsat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk teknik wawancara kepada informan yang terdiri dari Kepala Balai TNBT, Tenaga Ahli Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan (BP2TSTH), dan kelompok tani hutan.

Teknik analisa data dilakukan dengan cara menganalisis dan mendeksripsikan data yang terkumpul secara menyeluruh mengenai keadaan pada objek penelitian, kemudian penulis mengambil kesimpulan dalam bentuk penelitian yang dilakukan dengan tata cara ilmiah.

Hasil Penelitian

Standar Dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan hal yang hendak dilakukan dan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dibuat mempunyai tujuan yang akan dicapai (Putri et al., 2020). Baiknya suatu program

pemberdayaan masyarakat harus mempunya standar dan sasaran kebijakan, oleh sebab itu pertanyaan yang penulis buat dalam melakukan wawancara terdiri dari penentuan kriteria penerima program, penerapan target hasil produksi, dan adanya SOP. Untuk hasil wawncara yang penulis tujukan kepada Kepala Balai TNBT dan Tenaga Ahli Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan (BP2TSTH), beliau mengatakan bahwa:

"Target atau sasaran penerima programnya adalah masyarakat lokal seperti suku Talang Mamak dan Melayu Tua melalui berbagai program yang dilakukan dan salah satunya adalah budidaya madu kelulut. Untuk penetapan target hasil produksi madu yang hendak dicapai melalui program memang belum ada ditetapkan harus berapa banyaknya walaupun yang seharusnya itu setiap bulan madu harus di panen. Sedangkan untuk SOP dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sudah dibuat". (wawancara 03 September 2021).

Dari kutipan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa kriteria penerima program pemberdayaan masyarakat ini memang diperuntukan kepada masyarakat tempatan yaitu suku Talang Mamak yang ada di Kecamatan Gansal khususnya Desa Rantau Langsat. Meskipun tidak ada target mengenai hasil panen madu namun dalam pelaksanaannya program ini dinilai dapat membantu perekonomian masyarakat suku Talang Mamak.

Untuk wawancara dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), mereka mengatakan bahwa:

"*Untuk budidaya madu kelulut ini sasaran atau kriteria penerima memang ditujukan kepada masyarakat suku talang mamak bagi siapa saja mereka yang mau ikut program. Untuk target hasil panen madu sejauh ini belum ada ditargetkan. Dan untuk SOP sejauh ini masyrakat yang tergabung dalam KTH telah mengikuti arahan dari Balai TNBT." (wawancara 05 September 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa untuk pelaksanaan program ini memang sudah tepat sasaran, namun sangat disayangkan belum ada target yang mana target tersebut dapat mengukur keberhasilan dari petani madu kelulut.

Berdasarkan observasi penulis tidak semua masyarakat suku talang mamak yang ada di Desa Rantau Langsat tertarik terhadap program tersebut. Hal ini dapat dilihat

melalui data dimana setiap KTH hanya diikuti oleh 10 orang yang terdiri dari 4 KTH. Adapun persyaratan untuk mengikuti program pemberdayaan ini tidak ada kriteria tertentu, karena program ini diperuntukan khusus dan terbuka bagi masyarakat Talang Mamak yang berada dikawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Sedangkan untuk SOP dari program pemberdayaan dalam budidaya madu kelulut ini berbentuk petunjuk teknis mengenai keseluruhan proses budidaya sampai penjualan produk hasil panen madu kelulut tersebut. Hanya sangat disayangkan untuk proses pelaksanaan SOP pada masyarakat penerima program masih belum keseluruhan terlaksana dengan baik. Misalnya saja pada petunjuk mengenai perawatan *topping kloni* yang seharusnya diperhatikan lebih dengan perawatan teratur malah banyak yang rusak dan diserang serangga pengganggu madu yang menyebabkan hasil panen tidak terlalu bagus hasilnya, sehingga langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut lebih harus mengedukasi masyarakat akan kesadaran merawat kelangkapan budidaya sehingga program ini bisa berhasil mencapai targetnya.

Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik itu berupa sumber daya manusia, finansial, waktu, maupun sarana yang merupakan sumber daya penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi (Khasanah et al., 2018).

Pertanyaan dalam indikator sumber daya ini terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan ketersediaan dana. Berdasarkan wawancara penulis dengan pegawai Balai TNBT dan Tenaga Ahli BP2TSTH sebagai berikut:

"*Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pemberdayaan terkhusus untuk pendampingan dan pengawasan masih terbatas jumlahnya yaitu sebanyak 2 orang. Sedangkan untuk sarana dan prasarana pelaksanaan program memang sudah diusahakan memadai, akan tetapi dengan jumlah yang ada dapat dikatakan masih kurang memadai untuk keseluruhan pelaksanaan program. Untuk ketersediaan dana dalam program pemberdayaan ini tidak ada kendala, karena dana dinilai sudah cukup untuk membiayai program kegiatan." (wawancara 03 September 2021).*

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa untuk sumber daya dalam pelaksanaan program tersebut belum dikatakan terpenuhi karena untuk sumber daya manusia dan sarana prasarana belum memadai. Misalnya untuk jumlah

pendamping dari program pemberdayaan hanya berjumlah 2 (dua) orang, dimana jumlah tersebut dirasakan kurang jika dibandingkan dengan beban kerja.

Untuk wawancara dengan masyarakat mengenai sumber daya ini, dimana mereka mengatakan bahwa:

"*untuk jumlah sumber daya manusia dirasa memang kurang untuk mendampingi jumlah KTH yang ada. Untuk Sarana dan Prasana yang ada dirasa masyarakat masih terbatas dan tidak memadai guna memenuhi kebutuhan produksi madu kelulut. Sedangkan untuk Ketersedian dana yang ada masih terlihat dan dirasa kurang oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan program.*" (*wawancara 05 September 2021)*

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan penerima program memang rata-rata marasa jumlah sumber daya yang ada dalam program pemberdayaan ini masih banyak kekurangan baik itu sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan dan pendampingan (Pihak Balai TNBT), ketersedian sarana dan prasarana pendukung hingga ketersedian dana dalam pelaksanaan program yang juga dirasa kurang mencukupi untuk keperluan dan kebutuhan pelaksanaan program sehingga masyarakat merasa dalam hal sumber daya ini masih belum optimal untuk pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat dan mengetahui bahwa sumber daya yang dimiliki memang rata-rata masih terdapat kekurangan terkhusus untuk pendamping yang jumlahnya tidak singkron jika dibandingkan dengan jumlah KTH yang ada sehingga kurang maksimalnya pendampingan untuk penerima program pemberdayaan ini karena keterbatasan sumber daya manusia. Untuk sarana dan prasarana program pemberdayaan terdiri dari:

Tabel 3: Bantuan Sarana Prasarana

Nama KTH/Dusun					
No	Paket Bantuan	Jelemu Bengayouan (Bengayaouan)	Bomban Berduri (Air Bomban)	Kasih Alam (Nunusan)	Batu Berdiri (Sadan)
1	Koloni Kelulut	15	15	15	15
2	Kotak *Topping*	25	25	25	25
3	APD/masker	5	5	5	5
4	Alat Panen	5	5	5	5
5	Botol Kemasan	50	50	50	50

Sumber Data: Balai TNBT 2021

Untuk sumber daya dana yang diberikan oleh Balai TNBT tidak ada dalam bentuk uang tunai namun bantuan diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana seperti yang terdapat pada tabel 3 diatas serta pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak Balai TNBT.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan (Fiqih et al., 2021). Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan organisasi pelaksana adalah Pihak Balai TNBT dan Tenaga Ahli BP2TSTH. Berdasarkan wawancara penulis dengan organisasi pelaksana tersebut adalah sebagai berikut:

"*Fungsi dan tanggung jawab organisasi pelaksana dalam pemberdayaan masyarakat ini sudah jelas karena para pegawai sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tingkat komitmen dan kejujuran organisasi pelaksana juga sangat penting, hal ini dikarenakan komitmen yang ditanamkan dalam pelaksanaan program benar-benar untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program dan kejujuran pelaksanapun sudah terlihat dengan bagaimana keterbukaan mereka dengan masyarakat penerima program mengenai seluruh informasi. Selain itu, dalam pelaksanaan program ini agen/organisasi pelaksana memiliki kemampuan untuk membantu KTH binaan dalam penyelesaian masalah yang ada saat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam budidaya madu kelulut ini". (wawancara 03 September 2021).*

Dari petikan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa pegawai selaku organisasi yang melaksanakan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat telah melakukan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya. Selain itu organisasi pelaksana juga memiliki tingkat komitmen kejujuran serta mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat suku Talang Mamak.

Untuk wawancara dengan masyarakat mengenai indikator karakteristik organisasi pelaksana ini adalah sebagai berikut:

"untuk jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Sedangkan tingkat komitmen dan kejujuran pelaksana benar dirasakan baik oleh sebagian masyarakat selaku penerima program. Jika adapermasalahan pihak pelaksana dirasa sebagian masyarakat bisa menyelesaikan masalah yang ada ditemui masyarakat dalam proses pelaksanan kegiatan pemberdayaan ini"(wawancara 05 September 2021).

Dari wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa untuk indikator karakteristik organisasi pelaksana dengan penilaian kejelasan fungsi dan tanggung jawab masing-masing para pelaksana sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk tingkat komitmen pegawai selaku agen pekasana juga dirasa sudah baik. Sedangkan untuk penyelesaian masalah juga sudah baik karena dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui madu kelulut ini jarang sekali ditemui kendala-kendala yang bersifat urgen.

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat dan mengetahui bahwa karakteristik pelaksana rata-rata memang bertanggung jawab dengan baik dan mengetahui juga fungsi mereka dengan baik dalam pelaksanaan program yang dijalankan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini setiap unsur elemen masyarakat dan pemerintah bisa saling bekerja sama dengan baik untuk keberhasilan pelaksanaan program walaupun dari setiap masyarakatnya masih memiliki kemampuan yang rendah untuk memahami setiap arahan penyelesaian masalah yang diberikan pihak Balai TNBT itu tidak menyurutkan semangat pihak Balai TNBT untuk tetap mengerahkan segala upaya yang maksimal untuk memotivasi masyarakat agar bisa semangat dalam kegiatan budidaya ini.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana (disposisi) mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi seluruh implementasi kebijakan yang efektif. (Hasibuan et al., 2016). Diharapkan sikap para pelaksana harus sinkron mengenai rencana program atau kebijakan yang dibuat dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat sekitarnya.

Terdapat beberapa pertanyaan yang penulis tujukan kepada responden yaitu mengenai pemahaman dan pendalaman program, partisipasi masyarakat dalam program, dan kemampuan melakukan pengembangan program. Berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak Balai TNBT dan Tenaga Ahli BP2TSTH adalah sebagai berikut:

"Pelaksanaan dalam program pemberdayaan ini rata-rata sudah memiliki keahlian yang baik dalam kegiatan budidaya madu kelulut karna memang sudah memahami bagaiamana teknis budidaya yang baik. Kami mampu membuat produksi hasil lainnya selain madu melalui kegiatan budidaya ini walaupun faktor terpenting berada di masyarakat juga untuk ikut berpartisipasi secara lebih agar program bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang partisipasinya dalam program ini" (wawancara 03 September 2021).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak balai TNBT dan Tenaga Ahli BP2TSTH memang sudah mempunyai keahlian dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan madu kelulut. Tetapi walaupun demikian masih ada masyarakat yang tidak tertarik dengan program ini dikarenakan ada kegiatan lain atau memang tidak tertarik sama sekali.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan pihak masyarakat adalah sebagai berikut:

"Dalam pemahaman dan pendalaman program dimana masyarakat masih banyak yang belum memahami dengan baik bagaimana teknis budidaya madu kelulut yang baik dan benar. Selain itu, partisipasi masyarakat kebanyakan masih cukup rendah karna beberapa faktor yang diantaranya adalah masyarakat cenderung malu-malu mengikuti program. Masyarakat dalam hal ini juga belum bisa memahami bagaimana cara mengembangkan hasil olahan untuk hasil selain madu walaupun sebelumnya sudah ikut dalam pelatihan". (wawancara 05 September 2021).

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui madu kelulut yang dibuat untuk masyarakat lokal ini dimana sikap para pelaksana di lingkungan Balai TNBT mulai dari penyuluh serta tenaga ahli dari instansi lain (BP2TSTH) sudah mengupayakan setiap proses pelaksanaan program ini dapat berjalan sesuai keinginan masyarakat agar tumbuhnya partisipasi masyarakat yang tinggi untuk pencapaian tujuan program. Namun tergantung animo dari masyarat apakah berpartisipasi atau tidak. Faktor partisipasi masyarakat menjadi penentu terhadap keberhasilan program ini juga menjadi perhatian lebih oleh pihak Balai TNBT dan BP2TSTH terkhusus untuk melakukan pengembangan hasil produksi yang baik terhadap program walaupun belum ada kemajuan lebih dari hal ini. Penulis melihat bahwa ada penyelesaian masalahnya yakni dengan lebih sering memberikan pelatihan mengenai teknis pengembangan hasil produksi madu secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Sehingga masyarakat mendapat wawasan lebih dari hasil pelatihan tersebut.

Komunikasi Antara Badan Pelaksana

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik (Sopiana et al., 2021). Komunikasi antar organisasi yang dimaksud yakni merupakan koordinasi dalam pelaksanaan program

maupun kebijakan. Untuk melihat hasil tanggapan responden yani Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli dari BP2TSTH sebagai berikut:

"Kami laksanakan program pemberdayaan ini tidak hanya menjadikan kami (Pihak Balai TNBT) sebagai pelaksananya sendiri, kami juga mengajak pihak lainnya seperti pihak Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan Kuok untuk membantu pelaksaan program dengan mengikutsertakan mereka sebagai narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi dan membantu mengajari masyarakat mengenai teknis budidaya madu kelulut. Sementara untuk koordinasi dengan pihak desa selalu kami lakukan karna pada dasarnya pun wilayah kerja kami berada di wilayah administrasi pemerintahan desa jadi tentu alur koordinasi dan komunikasi yang benar harus dilakukan dalam rangka suksesnya suatu program kegiatan ini" (wawancara 03 September 2021).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sosialisasi program dan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan desa sudah dilakukan oleh pihak Balat TNBT guna suksesnya program pemberdayaan masyarakat ini. Kemudian, untuk wawancara dengan masyarakat suku Talang Mamak mengenai pemberdayaan ini adalah sebagai berikut:

"*sosialisasi program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya madu kelulut ini sudah dilaksanakan dan di ikuti lansung juga oleh sebagian masyarakat penerima program. Kegiatan atau program ini juga telah melibatkan pemerintah desa, karena bagaimanapun dan apapun bentuk kegiatan oleh intansi pemerintah mesti diketahui oleh pemerintah desa dan intansi lainnya*." *(wawancara 05 September 2021).*

Dari wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini telah dilakukan sosialisasi oleh pihak Balai TNBT sebagai penanggung jawab kegiatan, selain itu pihak Balai TNBT juga melakukan komunikasi dan koordinasi kepada piha-pihak lain diantaranya adalah kepada Kepala Desa dan pihak lainnya.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi terbangun baik antara pihak Balai TNBT dan Pihak Desa serta intansi lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan program karena proses mengenai sosialisasi tentang program dilaksanakan dengan baik serta untuk koordinasi dengan instansi lainnya juga dilaksanakan. Hanya saja disini penulis melihat ada satu kekurangan dalam hal

membangun kerja sama dengan pihak swasta yang mana jika dilihat dari peluang pemasaran hasil produksi akan terbantu jika bisa melibatkan pihak swasta didalamnya, sehingga saat ini fokus dari permasalahan yang terjadi mengenai pemasaran produk hasil produksi madu kelulut bisa saja terbantu melalui kerja sama dengan pihak swasta yang mau terlibat nantinya.

Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Ketika lingkungan sosial, ekonomi dan politik menunjang dilaksanakannya kebijakan maka, kebijakan tersebut akan sukses namun sebaliknya kebijakan akan gagal (Hasmir dan Tindjabate, 2018). Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula mempertahankan kekondusifan kondisi sosial lingkungan eksternal (Sumpeno, 2020).

Untuk mengetahui hasil wawancara penulis dengan responden dari Pihak Balai TNBT dan Tenaga Ahli dari BP2TSTH dapat dilihat pada keterangan dibawah ini:

"Masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan masyarakat suku talang mamak melalui budidaya madu kelulut ini memang rata-rata masyarakatnya fokus mencari penghasilan melalui hasil alam yang ada dikawasan TNBT tanpa pernah mencoba berpikir untuk menghadirkan alternatif pendapatan lainnya. Jadi saat kami menghadirkan program ini kemasyarakat di kawasan TNBT mereka lansung menyambutnya dengan baik dan positif karna juga pastinya mereka juga meyakini program yang dibuat akan mampu membuat pendapatan ekonomi masyarakat suku Talang Mamak akan meningkat" (wawancara 03 September 2021).

Dari wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam upaya menciptakan hubungan baik dengan masyarakat dalam program pemberdayaan pelaksana sudah melakukan komunikasi dan pendekatan yang baik kepada masyarakat. Masyarakat juga menganggap bahwa program yang dibuat ini akan memberikan hal positif juga kepada mereka. Program ini juga dinilai akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa harus fokus pada mata pencarian yang mengharuskan masyarakat terus bergantung pada hasil alam atau hutan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan pihak masyarakat suku Talang Mamak yang ada di Taman Nasional Bukit Tigapuluh adalah sebagai berikut:

"Dalam menciptakan hubungan baik bagi masyarakat pihak pelaksana sudah melakukannya dengan baik. masyarakat penerima program benar menanggapi positif program yang telah dibuat ini

dan mengharapakan hasil yang positif juga kedepannya. Untuk pengaruh program pemberdayaan Sebagian masyarakat menilai positif, namun sebagian masyarakat mengaku belum sama sekali mendapat bagian hasil dari program tersebut." (wawancara 05 September 2021).

Dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaruh lingkungan sosial yang ada di beberapa dusun tempat pelaksanaan program memang masyarakat menyabut baik dan mendapat tanggapan positif walaupun dalam segi lingkungan ekonominya masyarakat masih belum merasakan dampak yang begitu signifikan dari hasil yang didapat melalui program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat yang berada dikawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh saat program ini mulai dilaksanakan masyarakat menyambut program ini dengan baik dan yakin dengan usaha yang akan mereka lakukan dari budidaya madu kelulut ini akan menghasilkan dan meningkatkan ekonomi mereka. Namun dalam beberapa hal masyarakat yang masih belum merasakan adanya dampak peningkatan ekonomi dari hasil program ini masih menganggap hasil madu tidak akan mampu menutupi kebutuhan ekonomi mereka jika program hanya berfokus kepada hasil madu yang cenderung dirasa lama oleh masyarakat. Sehingga seharusnya masyarakat bisa dibuat lebih mandiri dalam hal meningkatkan hasil ekonomi dari hasil madu ini tanpa terlalu bergantung lebih kepada pihak Balai TNBT, misalnya masyarakat bisa berinisiatif melakukan pemasaran produk tanpa harus menunggu pihak Balai TNBT menjemput hasil madu sehingga hasil penjualan bisa didapat lebih cepat nantinya.

Kesimpulan

Pelaksanan kegiatan pemberdayaan hendaknya bisa disampaikan kepada seluruh pihak terkait agar nantinya pelaksanaan program pemberdaayan ini bisa mencapai hasil yang diharapkan. Sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan dan monitoring kepada kelompok tani hendaknya lebih ditingkatkan jumlahnya. Pelaksanaan sosialisasi yang sudah dilakukan sebaiknya ditambahkan lagi dengan kegiatan pelatihan pengembangan yang dilaksanakan rutin dalam kurun waktu tertentu baik itu dalam bentuk seminar atau dengan kegiatan pemberian Materi. Dalam penyelesaian masalah yang ada dalam kegiatan pemberdayaan baik mengenai teknis budidaya yang paling baik seperti apa dan juga lebih kepada membantu masayarakat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi..

Daftar Pustaka

Charin, R. O. P., & Hidayat, A. (2019). Usaha Masyarakat Suku Talang Mamak untuk Mempertahankan Eksistensinya di tengah perebutan Sumber Daya Hutan Adat. *Society*, *7*(1), 23–38.

Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *6*(1), 135–143.

Febrianti, F., M, I. A., & Muflihati, M. (2020). Bentuk Pintu Masuk Sarang Trigona Spp Di Kawasan Hutan Mangrove Surya Perdana Mandiri Kelurahan Setapuk Besar Singkawang Utara. *Jurnal Hutan Lestari*, *8*(3), 620–627. https://doi.org/10.26418/jhl.v8i3.42349

Fiqih, M., Dayat, U., Febriantin, K., & Singaperbangsa, U. (2021). *Implementasi kebijakan program indonesia pintar (pip) pada jenjang sekolah dasar*. *18*(4), 2021–2539. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA

Hasibuan, H., Yusnadi, & Purba, S. (2016). Implementasi Kebijakan Standar Kualiikasi Dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. *Pendidikan Dan Kepengawasan*, *3*(2), 33–49. https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673

Hasmir dan Tindjabate, C. (2018). *Implementasi Kebijakan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (Bpjs) Subsidi Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong*. *2*, 159–171.

Indiyahono, D. (2016). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta, Gava Media.

Khasanah, N., Sukarno, R., Yustira, O., Fitriyani, N., Intan Pramesti, T., Maolana, H., Haikal, R. F., & Pendamping Joko Tri Nugraha, D. (2018). Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, *02*(02), 30–35.

Kompas.com. (2022). *10 Negara dengan Hutan Terluas di Dunia*. https://www.kompas.com/skola/read/2022/01/11/172034669/10-negara-dengan-hutan-terluas-di-dunia?page=all#:~:text=Penebangan Terus-menerus-,Indonesia,dari total luas hutan dunia.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE/SET/kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Pribadi, A. (2020). Produktivitas Panen Propolis Mentah Lebah Trigona itama Cockerell (Hymenoptera: Apidae) Menggunakan Propolis Trap dan Manipulasi Lingkungan

di Riau. *A Scientific Journal*, *37*(2), 60–68. https://doi.org/10.20884/1.mib.2020.37.2.1045

Pribadi, A., Yunianto, A. S., Hajjah, N., & Sarah, F. A. (2020). Pemberdayaan dan usaha peningkatan ekonomi suku Talang Mamak di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh melalui budidaya Kelulut (Heterotrigona itama). *Unri Conference Series: Community Engagement*, *2*, 98–105. https://doi.org/10.31258/unricsce.2.98-105

Putri, D. O., Kurniansyah, D., & ... (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu …*, *3777*(November), 755–770. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3764

Satmoko, S., Prasetyo, A. S., & Pertiwi, Y. I. (2019). Strategi Penghidupan Masyarakat Desa Hutan Di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, *3*(2), 174–182. https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v3i2.5617

Sholichah, N., & Oktoliya, C. (n.d.). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kelurahan Sarangan Kacamatan Plaosan Kabupaten Magetan*. 125–145.

Siswanto, W. (2017). Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia : pengelolaan saat ini, pembelajaran dan rekomendasi. *Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Kerja Sama Dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, 1–20.

Sopiana, C., Arifianti, R., & Candradewini. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Bandung (Studi Kasus Penanggulangan Covid19 di Puskesmas Majalaya) Tahun 2021. *Journal of Responsive*, *4*(3), 173–188. http://journal.unpad.ac.id/responsive/article/view/34747

Sumpeno, T. (2020). Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis Berdasarkan Sistem Penilaian Pegawai Berbasis Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *7*(1), 76–99, e-ISSN 2614-2945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Taahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Vol. 4, Issue 1). (1990).

Zubir, Z. (2016). Dari Mukjizat ke Pemerataan : Kajian Ekonomi Petani Indragiri Hulu. *Jurnal UGM*, *12*(2), 144–156.

© 2022 by the authors. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license.